

## **Mati-matian Selamatkan Keragaman Hayati Aceh**

































## **Teuku Kemal Fasya**

Entah ini menjadi penanda baik atau buruk, tapi kejadian ini menjadi pengalaman yang memiliki kesan mendalam (*moment of truth*) bagi penulis terhadap masa depan lingkungan lestari di Aceh.

Pada 15 Oktober 2024, Pemkab Aceh Utara, bekerjasama dengan Bappenas, dan USAID Segar (Sustainable Environmental Governance Across Regions) melaksanakan konsultasi publik terkait profil keragaman hayati (Kahati) Aceh Utara.

Proyek ini sendiri merupakan turunan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Kahati Daerah. Profil ini mencakup keadaan umum, kebijakan dan kelembagaan, kawasan hutan lindung dan budidaya, serta data keragaman hayati.

Sayangnya kegiatan itu tidak dihadiri oleh Pj Bupati Aceh Utara. Beberapa pejabat penting rupanya mengubah rute kegiatan, dari peresmian bendungan/waduk Keureto yang rencana awal digunting pita secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Aceh Utara, menjadi kegiatan yang dipusatkan di Banda Aceh saja. Tidak ada narasi lagi tentang peresmian Waduk Keureto.

Waduk Krueng Keureto, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara disebut terbesar di Sumatera itu akan menjadi penangkal banjir regional, ternyata belum selesai. Malah Aceh Utara sedang dilanda banjir akibat Krueng Keureto meluap. Tak mungkin Presiden hadir melihat ironi dan kontradiksi itu!

## **Tekanan pembangunan**

Proyek Kahati ini memang menjadi bagian agenda pembangunan Indonesia jangka panjang. Dalam kacamata Bappenas dan USAID yang menginisiasi program ini, keragaman hayati (*biodiversity*) jelas akan terus mengalami tekanan, terutama model proyek pembangunan infrastruktur skala besar.

Indonesia mungkin mencatat Presiden Jokowi sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia, melanjutkan penabalan Soeharto sebagai Bapak Pembangunan. Namun proyek pembangunan yang berbasis kepada rancang-bangun teknokratis ini jelas telah memberikan derita pada lingkungan.

Upaya Soeharto untuk menjadikan sawit sebagai penguat ekonomi nasional melalui sektor perkebunan telah menyebabkan sengkarut masalah turunan yang dirasakan hingga kini. Mulai perusakan hutan lindung dan hutan adat, peminggiran masyarakat asli dan lokal, kartel mafia pengontrol harga, manipulasi data perdagangan, hingga penggelapan pajak. Menurut Transparency International Indonesia (TII), setiap tahun rata-rata pendapatan negara hilang Rp22,83 triliun akibat upaya penghindaran pajak perusahaan-perusahaan sawit (*Kompas.id*, 12/1/2022). Uang-uang ini sebagian masuk ke perguruan tinggi melalui pendanaan penelitian rendah *output* ilmiah, yang gunanya tak lain membangun asumsi sawit itu penting bagi pembangunan ekonomi dan tidak mengganggu lingkungan.

Hal itu termasuk keluarnya kajian mendukung regulasi pemerintah terkait sawit (Inpres No.8 tahun 2018) tentang Rencana Aksi Nasional kelapa sawit berkelanjutan (RAN-KSSB) tahun 2019-2024. Nyatanya, banyak kepalsuan yang *berselemak-peyak*, termasuk ancaman bagi keragaman hayati, bencana banjir, kekeringan, degradasi lahan pasca-HGU, dan peningkatan kemiskinan. Uni Eropa sendiri telah memiliki kajian relatif paten bahwa industri sawit termasuk *high risk* (bahan yang tidak berkelanjutan) karenanya mereka memberlakukan EUDR (The European Union Deforestation-free Regulation) yang menganggap bahwa perusahaan kelapa sawit termasuk yang mengancam perusakan hutan (Bustanul Arifin, *Kompas.id*, 25/6/2024).

## **Mengumpulkan “surga” tersisa**

**Tanggal:** 09 November 2024

**Post by:** [kemal](#)

**Kategori:** [News](#), [Repository Media](#),

**Tags:** [Unimal](#), [Kebencanaan](#), [Sosial](#),